

Analisis *Open Government* dalam Platform Kebijakan Sosial: Studi Komparatif pada Aplikasi CekBansos Indonesia dan YourTexasBenefits United States

La Mikha Sebastian P ^{*1}
Difa Nafchan Shofa ²
Cendana Syarafina Putri ³
Novareiza Armando S ⁴
Saskia Nathania Auryrn ⁵
Nabilla Azizah Putri ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia

*e-mail: lmsprabowo@student.ub.ac.id, difanafchan@student.ub.ac.id, cendana@student.ub.ac.id, novareiza@student.ub.ac.id, saskia_auryrn@student.ub.ac.id, nabillaazizah@student.ub.ac.id

Abstrak

Perkembangan *digital government* mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju model yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, terutama pada ranah kebijakan sosial. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip *open government* melalui studi komparatif platform CekBansos di Indonesia dan YourTexasBenefits di Amerika Serikat. Temuan utama mengindikasikan bahwa CekBansos lebih unggul dalam aspek transparansi dan partisipasi publik berkat keterbukaan data serta fitur pengusulan dan sanggahan, walaupun masih terkendala oleh integrasi sistem dan responsivitas layanan. Di sisi lain, YourTexasBenefits menunjukkan kematangan tata kelola digital yang lebih baik melalui sistem terintegrasi, pelacakan bantuan secara real-time, serta akuntabilitas yang lebih tinggi, meskipun transparansi publiknya dibatasi pada pengguna terdaftar. Oleh karena itu, keterbukaan pemerintahan tidak hanya bergantung pada akses informasi, melainkan juga efektivitas sistem layanan, sehingga diperlukan keseimbangan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas guna mencapai tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *open government*, *digital government*, kebijakan sosial

Abstract

The development of digital government has driven the transformation of public governance toward a more transparent, participatory, and accountable model, particularly in the realm of social policy. This study analyzes the implementation of open government principles through a comparative study of the CekBansos platform in Indonesia and YourTexasBenefits in the United States. The main findings indicate that CekBansos excels in terms of transparency and public participation due to its data openness, as well as features for public proposals and objections, although it still faces challenges related to system integration and service responsiveness. On the other hand, YourTexasBenefits demonstrates a higher level of digital governance maturity through an integrated system, real-time benefit tracking, and stronger accountability, despite its public transparency being limited to registered users. Therefore, open government is not solely dependent on access to information but also on the effectiveness of service systems, highlighting the need for a balance between transparency, participation, and accountability to achieve inclusive and sustainable governance.

Keywords : *open government*, *digital government*, *social policy*

PENDAHULUAN

Transformasi *digital government* merupakan konsep dan pusat perhatian di berbagai sektor termasuk pemerintahan, karena memiliki potensi dalam merombak cara beroperasi organisasi dan memberikan layanan dalam bentuk digital. Di dalam transformasi *digital government* terdapat pergeseran mindset birokrasi menuju model yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Transformasi birokrasi melalui *e-government* harus didukung oleh beberapa faktor: dukungan

regulasi, struktur organisasi, budaya organisasi, pembaruan sistem. Transformasi *digital government* menjadi salah satu faktor strategi yang penting dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berbasis cepat dan transparan. Tata kelola pemerintahan yang modern berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah secara mandiri, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketika teknologi digital berkembang, pemerintah memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan dan berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain menginisiasi *Open Government Partnership* (OGP), sebagai paradigma negara-negara yang terlibat dalam membangun tata pemerintahan yang mendukung keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan (Nurdin, 2018). Untuk menerapkan prinsip pemerintahan terbuka, negara harus berkomitmen untuk meningkatkan akses informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, menciptakan standar integritas profesional yang terbaik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatkan akses ke teknologi baru yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga bermanfaat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *open government*, pemerintah memegang peran sentral baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan yang mendukung keterbukaan tata kelola. *Open government* merupakan proses multilateral, politis, dan sosial yang mencakup tindakan pemerintah dan administrasi yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan elemen-elemen prasyarat pengembangan strategi dan inisiatif keterbukaan pemerintah dalam *open government* meliputi komitmen politik, kerangka kebijakan, serta kerangka hukum yang kuat. Terdapat juga unsur-unsur pendukung implementasi kebijakan pemerintahan terbuka seperti koordinasi lintas pemerintahan, praktik pemantauan dan evaluasi, serta menciptakan mekanisme pembelajaran. Selain itu, unsur penunjang lainnya berupa komunikasi yang efektif, dan penggunaan data terbuka, alat digital, serta inovasi.

Implementasi *open government* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak bergabung dalam *Open Government Partnership* pada tahun 2011. Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, seperti portal data terbuka, layanan pengaduan daring, serta digitalisasi layanan publik. Namun, praktik *open government* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap data pemerintah, rendahnya kualitas keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat yang masih bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya kolaboratif. Selain itu, kesenjangan literasi digital dan kapasitas kelembagaan antar daerah turut mempengaruhi efektivitas implementasi pemerintahan terbuka. Menurut Wirtz dan Birkmeyer (2015), keberhasilan *open government* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh komitmen institusional dalam menjamin transparansi, partisipasi, dan kolaborasi masyarakat.

Sebagai implementasi *open government* dalam sektor pelayanan sosial, Indonesia mengembangkan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat memeriksa status penerima bantuan sosial serta memberikan usulan maupun sanggahan terhadap data penerima. Di sisi lain, pemerintah Texas mengembangkan YourTexasBenefits yang menyediakan akses informasi, pengajuan, pemantauan, dan pengelolaan berbagai program bantuan sosial secara digital. Kedua aplikasi tersebut sama-sama memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, namun memiliki karakteristik yang berbeda dalam aspek transparansi data,

partisipasi warga, dan integrasi layanan. Aplikasi Cek Bansos lebih menonjolkan mekanisme verifikasi sosial melalui usulan dan sanggahan masyarakat, sedangkan YourTexasBenefits berfokus pada integrasi layanan kesejahteraan dan pengelolaan manfaat secara daring. Perbandingan kedua aplikasi ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip *open government* diterapkan dalam tata kelola bantuan sosial di negara berkembang dan negara maju (Meijer et al., 2012).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus komparatif (*comparative case study*) untuk menganalisis implementasi prinsip *Open Government* pada platform kebijakan sosial CekBansos di Indonesia dan YourTexasBenefits di Amerika Serikat. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam karakteristik, proses, serta praktik tata kelola digital yang berlangsung pada masing-masing platform dalam konteks sosial dan kelembagaan yang berbeda. Objek analisis penelitian meliputi fitur layanan, mekanisme transparansi informasi, kolaborasi, bentuk partisipasi pengguna, integrasi sistem, aksesibilitas layanan, serta aspek akuntabilitas yang terdapat pada masing-masing platform. Pemilihan kasus dilakukan secara *purposive* karena kedua platform merepresentasikan praktik *open government* dalam sektor kebijakan sosial pada negara dengan tingkat perkembangan tata kelola digital yang berbeda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif dan analisis media dan dokumen secara mendalam. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi fitur, mekanisme layanan, alur penggunaan sistem, keterbukaan informasi, serta bentuk interaksi yang disediakan oleh platform CekBansos dan YourTexasBenefits. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dokumentasi platform, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema *Open Government* dan *digital governance*. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi dengan berbagai dokumen dan literatur yang digunakan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan konsisten.

LANDASAN TEORI

a). Teori *Open Government*

Open Government merupakan paradigma tata kelola pemerintahan yang menempatkan keterbukaan sebagai fondasi utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Lathrop dan Ruma (2010), perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peluang bagi pemerintah untuk bertransformasi dari model birokrasi yang tertutup menuju model pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan kolaboratif. *Open Government* bukan hanya dimaknai sebagai penyediaan informasi kepada publik, tetapi juga sebagai upaya membangun hubungan yang lebih setara antara pemerintah dan warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, teknologi digital berperan sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam urusan publik.

Lathrop menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama dalam *Open Government*, yaitu transparansi (*transparency*), partisipasi (*participation*), dan kolaborasi (*collaboration*). Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan data, informasi, dan proses pengambilan keputusan yang dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami bagaimana kebijakan diambil, bagaimana sumber daya publik digunakan, dan bagaimana pemerintah menjalankan tugas serta fungsinya.

Pilar kedua adalah partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan kebijakan publik. Lathrop menegaskan bahwa *Open Government* mendorong pemerintah untuk tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berpartisipasi dengan membuka

ruang dialog dan interaksi yang memungkinkan warga negara menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi publik menjadi elemen penting karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan pengetahuan kolektif masyarakat. Dalam era digital, partisipasi dapat diwujudkan melalui platform daring, layanan pengaduan elektronik, forum konsultasi publik, maupun berbagai mekanisme interaksi digital lainnya.

Pilar ketiga adalah kolaborasi, yaitu kerja sama antara pemerintah dengan berbagai aktor di luar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Lathrop menjelaskan dalam karyanya bahwa kompleksitas permasalahan publik tidak lagi dapat diselesaikan oleh pemerintah secara mandiri, namun memerlukan keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi, maupun warga negara dalam proses penciptaan solusi. Melalui kolaborasi, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang dimiliki para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *Open Government* tidak hanya berorientasi pada keterbukaan informasi, tetapi juga pada penciptaan ekosistem pemerintahan yang mampu menghasilkan inovasi secara bersama-sama.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Open Government* dari Lathrop dan Ruma digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip keterbukaan pemerintahan pada platform CekBansos di Indonesia dan YourTexasBenefits di Amerika Serikat. Transparansi dianalisis melalui keterbukaan informasi dan data bantuan sosial yang disediakan kepada masyarakat. Partisipasi dianalisis melalui mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi maupun pengelolaan data bantuan sosial. Sementara itu, kolaborasi dianalisis melalui kemampuan platform dalam menghubungkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Selain ketiga pilar utama tersebut, aspek integrasi data, aksesibilitas, dan inklusivitas dapat diposisikan sebagai indikator pendukung yang menunjukkan tingkat kematangan implementasi *Open Government* berbasis digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dalam Pelaksanaan *Open Government* di Indonesia

Open Government atau pemerintahan terbuka merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pemerintahan. Penerapan konsep ini di Indonesia tidak hanya didorong oleh tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Berbagai dasar hukum yang telah disahkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan telah menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap lembaga publik.

a). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Implementasi yang lebih konkret terhadap prinsip keterbukaan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini sering dianggap sebagai tonggak utama pelaksanaan *Open Government* di Indonesia karena secara khusus mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Melalui undang-undang ini, setiap badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat diperoleh masyarakat secara cepat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi pemerintah serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi. Kehadiran regulasi ini mengubah paradigma birokrasi yang sebelumnya cenderung tertutup menjadi lebih transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik.

b). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Open Government juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan dan evaluasi pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, maupun pengaduan terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah didorong untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

c). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Aspek akuntabilitas dalam *Open Government* semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administrasi pemerintah yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam konteks pemerintahan terbuka, akuntabilitas menjadi elemen penting karena memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah dapat diawasi serta dievaluasi oleh publik.

d). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

Perkembangan teknologi digital turut mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mendukung implementasi *Open Government* berbasis elektronik. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mengarahkan seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui SPBE, pemerintah berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi. Kehadiran berbagai layanan digital pemerintah, portal informasi publik, sistem pengaduan daring, serta aplikasi pelayanan berbasis elektronik merupakan bentuk nyata penerapan prinsip *Open Government* yang didukung oleh perkembangan teknologi.

e). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

Upaya memperkuat keterbukaan data pemerintah kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola data pemerintah yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka *Open Government*, ketersediaan data yang terbuka dan berkualitas sangat penting karena memungkinkan masyarakat, akademisi, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan, penelitian, maupun pengambilan keputusan. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

2. Prinsip Desain Platform Kebijakan

a). Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam desain platform kebijakan yang menekankan keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. Dalam konteks *open government*, transparansi tidak hanya berarti menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa data dan proses kebijakan dapat diakses, dipahami, serta digunakan kembali oleh masyarakat. Platform kebijakan yang baik harus menyediakan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil kebijakan secara sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, transparansi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah

b). Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses kebijakan, bukan sekadar penerima kebijakan. Dalam desain platform kebijakan, partisipasi diwujudkan melalui penyediaan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun ide dalam berbagai tahapan kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Platform yang dirancang dengan baik harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi, baik konsultatif, deliberatif, maupun kolaboratif. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkaya kualitas keputusan publik melalui pemanfaatan pengetahuan kolektif masyarakat

c). Kolaborasi

Kolaborasi merupakan prinsip yang menekankan kerja sama antara pemerintah dan berbagai aktor non-negara dalam proses kebijakan. Dalam perspektif *open government*, platform kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah, tetapi sebagai ruang interaksi yang memungkinkan *co-creation* kebijakan. Kolaborasi ini mencakup keterlibatan sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, dan akademisi dalam menciptakan solusi kebijakan yang inovatif. Prinsip ini menuntut perubahan peran pemerintah dari aktor dominan menjadi fasilitator yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam ekosistem kebijakan.

d). Integrasi Data

Integrasi data menjadi elemen penting dalam desain platform kebijakan modern. Platform yang efektif harus mampu mengintegrasikan berbagai sumber data dari berbagai lembaga sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif dan konsisten. Konsep linked data menekankan pentingnya interoperabilitas antar sistem untuk memungkinkan pertukaran data yang efisien dan penggunaan kembali data secara luas. Integrasi data ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

E. Aksesibilitas

Aksesibilitas mengacu pada kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses platform kebijakan secara mudah dan tanpa hambatan. Platform yang baik harus dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan (*user-friendly*), ketersediaan infrastruktur, serta kompatibilitas dengan berbagai perangkat digital. Aksesibilitas juga mencakup penyediaan informasi dalam format yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya dapat diakses secara teknis, tetapi juga secara substantif oleh masyarakat luas. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keterbukaan pemerintah tidak bersifat eksklusif, melainkan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh publik.

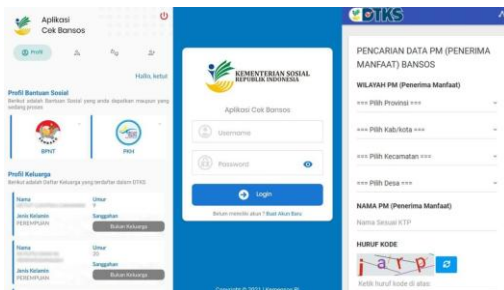
F. Inklusivitas

Inklusivitas merupakan prinsip yang memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam platform kebijakan. Dalam praktiknya, inklusivitas menuntut adanya desain yang sensitif terhadap perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya, serta mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*). Platform kebijakan yang inklusif tidak hanya membuka akses secara formal, tetapi juga secara aktif mendorong keterlibatan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses kebijakan. Dengan demikian, inklusivitas menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dalam tata kelola publik berbasis *open government*.

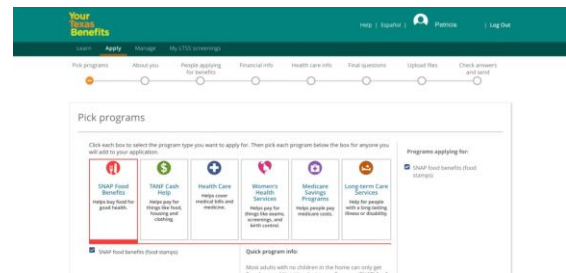
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam era digital, konsep keterbukaan pemerintahan tidak lagi hanya dimaknai sebagai transparansi informasi, tetapi juga mencakup partisipasi publik serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah di berbagai negara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial sekaligus memperkuat legitimasi

kebijakan publik. Indonesia melalui aplikasi CekBansos berupaya membuka akses data penerima bantuan sosial kepada masyarakat luas. Sementara itu, Amerika Serikat melalui platform YourTexasBenefits menghadirkan sistem pelayanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai program bantuan dalam satu pintu. Perbedaan pendekatan ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif tata kelola pemerintahan digital. Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan *Open Government* yang menekankan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, sedangkan akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab pemerintah terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, digunakan pula pendekatan *Digital Governance* yang mencakup integrasi sistem, efisiensi layanan, serta orientasi pada pengguna (*user-centered design*). Kombinasi kedua pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana platform digital mampu mendukung keterbukaan pemerintahan secara substantif, bukan hanya administratif.

Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, keberadaan platform pelayanan publik berbasis teknologi menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi kebijakan sosial yang transparan dan akuntabel. Aplikasi CekBansos di Indonesia dan YourTexasBenefits di Amerika Serikat merupakan dua contoh konkret inovasi digital dalam distribusi bantuan sosial. Sebagai studi kasus, pada masa pandemi *COVID-19*, CekBansos digunakan untuk memverifikasi penerima bantuan sosial tunai, namun ditemukan berbagai permasalahan seperti data ganda dan *inclusion error*, yaitu masyarakat yang tidak layak justru menerima bantuan. Di sisi lain, YourTexasBenefits dimanfaatkan untuk mengelola program seperti SNAP dan Medicaid, di mana masyarakat dapat langsung mengajukan dan memantau bantuan secara mandiri. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesiapan sistem digital antar negara.



Gambar 1. Dashboard Aplikasi CekBansos



Gambar 2. Dashboard Aplikasim YourTexasBenefits

Kedua gambar diatas merupakan gambar dari tampilan dashboard aplikasi CekBansos dan YourTexasBenefits. Melalui analisis mendalam dari aspek tata kelola, kedua platform mencerminkan prinsip keterbukaan pemerintahan, namun dengan penekanan yang berbeda. Studi kasus pada CekBansos menunjukkan bahwa fitur usulan dan sanggahan data memberikan ruang partisipasi publik, misalnya masyarakat dapat melaporkan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, laporan tersebut sering kali tidak segera ditindaklanjuti secara optimal karena keterbatasan integrasi data dan proses verifikasi lapangan. Sebaliknya, pada YourTexasBenefits, pengguna dapat melacak status pengajuan bantuan secara *real-time* serta menerima notifikasi terkait kelengkapan dokumen. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena sistem memberikan kepastian layanan secara langsung kepada pengguna. Dengan demikian, platform di Amerika Serikat cenderung lebih matang dalam tata kelola digital.

Perbandingan kedua studi kasus tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan akses informasi, tetapi juga efektivitas respons

sistem terhadap kebutuhan masyarakat. Pada kasus CekBansos, keterbukaan data belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas pengelolaan data, sehingga masih menimbulkan ketidakpercayaan publik di beberapa daerah. Sementara itu, YourTexasBenefits menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi mampu meningkatkan kepercayaan publik melalui kepastian layanan dan transparansi proses administratif. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa digitalisasi kebijakan sosial harus disertai dengan penguatan kapasitas institusi dan infrastruktur data. Oleh karena itu, pengembangan platform digital perlu diarahkan pada keseimbangan antara keterbukaan dan keandalan sistem.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Aplikasi CekBansos & YourTexasBenefits

| Komponen | CekBansos | YourTexasBenefits | Analisis |
|-----------------------|--|---|--|
| Transparansi | Menyediakan data penerima bansos yang dapat diakses publik | Informasi bantuan bersifat personal dan berbasis akun | CekBansos unggul dalam transparansi publik, namun kurang mendalam dalam sistem |
| Partisipasi | Terdapat fitur usulan dan sanggahan masyarakat | Partisipasi terbatas pada pengguna sebagai penerima | CekBansos lebih partisipatif, tetapi belum optimal dalam tindak lanjut |
| Kolaborasi | Bentuk kolaborasi masih terbatas pada validasi data dan belum melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan | Koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga pelayanan sosial di Texas, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan tunjangan keluarga dalam 1 platform | YourTexasBenefits lebih unggul dalam sektor kolaborasi antar lembaga, karena koordinasi antar instansi pemerintah lebih terintegrasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif |
| Integrasi Sistem/Data | Terbatas, bergantung pada DTKS | Terintegrasi lintas program (SNAP, Medicaid, dll.) | YourTexasBenefits menunjukkan kematangan dalam <i>digital governance</i> yang ditunjukkan oleh adanya sistem yang terintegrasi |
| Aksesibilitas | Mudah diakses, namun terkadang mengalami kendala teknis | Stabil, tersedia dalam web dan mobile | YourTexasBenefits lebih stabil dan <i>scalable</i> karena memiliki aksesibilitas yang lebih beragam |
| Inklusivitas | Inklusivitas | Memiliki fitur yang | YourTexasBenefits |

| Komponen | CekBansos | YourTexasBenefits | Analisis |
|----------|--|--|---|
| | ditunjukkan oleh fitur usulan dan sanggah yang memberikan kesempatan masyarakat mengoreksi data penerima bantuan | dapat melayani kelompok disabilitas, kelompok rentan, kelompok masyarakat beragam seperti dukungan fitur aksesibilitas dan layanan multibahasa | unggul dalam inklusivitas karena menyediakan fitur yang dapat mewadahi kebutuhan berbagai macam kelompok masyarakat |

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua platform terletak pada tingkat kematangan tata kelola digital. CekBansos masih berada pada tahap penguatan transparansi dan partisipasi publik, sementara YourTexasBenefits telah berkembang menuju integrasi layanan yang lebih komprehensif. Hal ini mencerminkan perbedaan kapasitas kelembagaan dan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing negara. Dari perspektif keterbukaan pemerintahan, CekBansos mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun, keterbukaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem yang responsif dan terintegrasi. Sebaliknya, YourTexasBenefits menunjukkan bahwa keterbukaan juga dapat diwujudkan melalui kepastian layanan dan kejelasan proses administratif, meskipun data tidak sepenuhnya bersifat publik.

Secara keseluruhan, kedua platform memiliki pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan keterbukaan pemerintahan. CekBansos lebih menonjol dalam aspek transparansi dan partisipasi, sedangkan YourTexasBenefits unggul dalam integrasi sistem dan akuntabilitas layanan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga efektivitas sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan platform digital kebijakan sosial harus memperhatikan keseimbangan antara transparansi, partisipasi, dan kualitas tata kelola digital.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengacu pada analisis komparatif implementasi *digital government*, pemerintah perlu melakukan transformasi peran dari sekadar aktor penyelenggara tunggal menjadi fasilitator atau orchestrator dalam ekosistem jaringan kebijakan publik. Rekomendasi utama berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan infrastruktur data masif yang mengedepankan interoperabilitas sistem antar lembaga. Pada kasus pengembangan aplikasi CekBansos di Indonesia, komitmen transparansi yang sudah berjalan patut diinkubasi lebih lanjut dengan mewujudkan integrasi data lintas program yang komprehensif, sehingga proses pengelolaan data tidak lagi bertumpu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terbatas. Oleh karena itu, pemerintah sangat direkomendasikan untuk mengadopsi kematangan tata kelola seperti yang diterapkan pada ekosistem YourTexasBenefits, khususnya dalam menghadirkan sistem pelacakan (*tracking*) bantuan dan status pengajuan secara *real-time* yang terbukti ampuh dalam menjamin akuntabilitas dan kepastian layanan administratif bagi masyarakat.

Inisiatif partisipatif berupa fitur usulan dan sanggahan publik di Indonesia harus diimbangi dengan komitmen birokrasi terhadap proses verifikasi lapangan yang responsif, guna meminimalisir ketidaktepatan sasaran bantuan seperti *inclusion error* maupun kemunculan data ganda. Optimalisasi teknologis ini juga wajib dibarengi dengan kerangka regulasi perlindungan privasi yang solid, pemeliharaan sistem informasi yang berskala inklusif (berpusat pada kepuasan dan kemudahan pengguna/ *user-friendly*), serta program afirmatif untuk menekan kesenjangan digital

(*digital divide*) yang ada di masyarakat. Melalui serangkaian intervensi yang seimbang antara kemajuan infrastruktur informasi dan peningkatan literasi digital ini, pemanfaatan teknologi tidak akan sekadar bersifat reaktif, melainkan mampu mendorong perumusan kebijakan sosial berbasis bukti (*evidence-based*) yang bersifat antisipatif dan berorientasi jangka panjang.

KESIMPULAN

Integrasi teknologi informasi dalam sektor pemerintahan publik telah memicu transformasi fundamental dalam operasional tata kelola kebijakan sosial, mengubah pendekatan hierarkis konvensional menjadi model ekosistem *digital government* yang berlandaskan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi terpadu. Berdasarkan hasil studi komparatif, terungkap dengan jelas bahwa manifestasi konsep *open government* pada platform CekBansos di Indonesia dan YourTexas Benefits di Amerika Serikat memiliki orientasi, penekanan prioritas, serta skala kematangan yang berbeda secara substansial. CekBansos merepresentasikan manifestasi awal keterbukaan melalui penyediaan akses data penerima bantuan secara masif bagi publik serta pembukaan ruang deliberasi masyarakat melalui fitur pelaporan usul dan sanggah. Walaupun demikian, esensi partisipatif ini masih terkendala oleh kapasitas responsibilitas tindak lanjut di lapangan serta keterbatasan integrasi kerangka sistem kesejahteraan.

Di kutub yang berlawanan, platform YourTexas Benefits menampilkan profil tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) yang jauh lebih mapan melalui sentralisasi layanan satu pintu yang terintegrasi secara lintas program, stabilitas arsitektur digital, serta penyematan sistem pelacakan informasi *real-time*. Kendati kualifikasi transparansinya terbatas hanya pada basis pengguna terdaftar ketimbang dibuka seluas-luasnya, platform ini berhasil merawat tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang lebih tinggi dengan menyajikan akuntabilitas dan validitas administratif yang terukur secara personal. Pada kesimpulan akhirnya, diskursus ini membuktikan bahwa terminologi keterbukaan pemerintahan di abad digital tidak boleh disederhanakan hanya pada seberapa melimpah informasi yang didistribusikan, melainkan harus dikontekstualisasikan melalui efisiensi daya tanggap sistem dalam memecahkan masalah birokrasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara konkret. Keberhasilan transformasi digital pada sektor publik mensyaratkan sebuah keseimbangan yang presisi antara perluasan ruang transparansi dan pelibatan sipil dengan pembangunan keandalan tata kelola sistem, demi mewujudkan kebijakan sosial yang sungguh-sungguh berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open government: Collaboration, transparency, and participation in practice. " O'Reilly Media, Inc."
- Malik, M. M. H. A., Irwan, & Zainuddin, A. H. (2026). Analisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 6(2), 155-162.
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open Government: Connecting Vision and Voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10-29.
- Nurdin, A. H. M. (2018). MENUJU PEMERINTAHAN TERBUKA (OPEN GOVERNMENT) MELALUI PENERAPAN E GOVERNMENT. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1-17.
- OECD. (n.d.). *OECD recommendation on open government: Policy briefing note*.
- Silitonga, A. J. (2024). Transformasi birokrasi pemerintah: Pergeseran paradigma dari era klasik ke modern dalam penerapan good government di era digital. *Journal of Social, Justice and Policy*, 3(6).
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381-396